

ANALISIS PENERIMAAN DAN PENGELURAN NEGARA INDONESIA TAHUN 2019-2021

**Devi Reza¹, Dwi Khorunnisaa Ramadhani², Khairun Nisa³,
Nurul Mahfuzdhoh⁴, Vidia Fitri⁵**

Email :

**deviliza103@gmail.com¹, dwikhrnssa@gmail.com², knisa8653@gmail.com³,
mahfuzdhohnurul@gmail.com⁴, vidiafitri97@gmail.com⁵**

Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Jambi

Jl. Jambi – Muara Bulian No.KM. 15, Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota,
Kabupaten Muaro Jambi, Jambi

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada tahun 2019-2021 dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan informasi dan data melalui jurnal dan artikel serta mengunduh data di bps.go.id. berdasarkan hasil penelitian ini terlihat bahwa pada tahun 2020 pendapatan pemerintah mengalami penurunan pendapatan yang disebabkan wabah covid-19. Sehingga Ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,07%. Atas peristiwa ini pemerintahpun tidak tinggal diam, dan sudah menyiapkan strategi untuk menanganinya, seperti pertambahan anggaran di bidang kesehatan, memberikan bantuan sosial, pemulihan perekonomian nasional serta kebijakan di sektor keuangan.

Kata kunci: analisis, pendapatan, pengeluaran

Abstract: This research was conducted with the aim of finding out how the development of government revenue and expenditures in 2019-2020 by using a qualitative descriptive research method and collecting information through journals and articles and downloading data at bps.go.id based on the result of this study it can be seen that in 2020 the income the government experienced a decrease in revenue due to the covid-19 outbreak. So that the Indonesian economy decreases by 2.07%. for this incident, the government has not remained silent and has prepared a strategy to handle it, such as increasing the budget in the health sector. Providing social assistance, national economic recovery and policies in the financial sector.

Keyword: analysis, income, expenditure

Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dimana secara geografis terletak pada posisi strategis, yaitu di persilangan antar dua benua (Benua Asia dan Benua Australia), dan dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik). Karena letak geografisnya yang strategis dan besarnya luas perairan, Indonesia berbatasan langsung di laut dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor-Leste, dan Australia.

Pendapatan negara Indonesia yang paling potensial adalah penerimaan pajak. Dimana Pajak merupakan kontribusi wajib seorang pribadi atau suatu instansi kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Pajak memiliki peranan penting dalam sumber pendapatan negara, karena pendapatan terbesar negara datang dari sektor pajak.

Adapun pendapatan negara pada tahun 2019 ini diperkirakan mencapai Rp. 2.165,1 triliun, dengan penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.786,3 triliun. Sedangkan Realisasi pendapatan negara sepanjang 2020 mencapai sebesar Rp. 1.633,6 triliun atau 96,1% (persen) dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp. 1.699,9 triliun. Serta realisasi pendapatan negara mencapai Rp. 2.011,3 triliun dan ini melebihi dari target dalam APBN 2021, dimana penerimaan perpajakan mencapai Rp. 1.547,8 triliun, PNBPN sebesar Rp. 458,5 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp. 5 triliun. Berdasarkan hal tersebut pendapatan negara pada tahun 2019 lebih tinggi di bandingkan pendapatan negara pada tahun 2020 serta pendapatan negara kembali naik pada tahun 2021.

Negara Indonesia harus menargetkan penerimaan pajak setiap tahunnya agar kas negara tidak mengalami kekurangan, banyak usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya dengan melakukan penagihan pajak. Pajak merupakan cara yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk mengamankan penerimaan pajak adalah dengan program amnesti pajak dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Amnesti Pajak adalah program pengampunan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh. Tujuan amnesti pajak jangka pendek adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tahun di terimanya uang tebusan yang berguna untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan.

Dari hasil penelitian Wijoyanti (2010) dengan judul “Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan” menyimpulkan bahwa dari hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa hitung > tabel ($5,073 > 2,032$), memiliki tingkat signifikansi 0,000 karena tingkat signifikan lebih kecil dari pada 0,05. Maka hal ini membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam hal lain negara Indonesia tentu juga memiliki pengeluaran seperti pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Penentuan pengeluaran pemerintah ialah jumlah pengeluaran yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung kepada banyak faktor yang penting diantaranya jumlah pajak yang akan diterima, tujuan ekonomi jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang serta pertimbangan politik dan keamanan. Komponen pengeluaran pemerintah terhadap pengeluaran total yang termasuk dalam klarifikasi fungsi ada beberapa komponen diantaranya pelayanan umum, pertahanan, ketentraman dan ketertiban, ekonomi, lingkungan hidup, fasilitas umum, pariwisata dan budaya, perlindungan sosial, pertanian, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. (Sukirno, 2010)

Ilustrasi atas rendahnya standar hidup penduduk di negara-negara dunia pada umumnya yang diuraikan mengenai distribusi kesempatan menikmati pendidikan. Penyediaan fasilitas pendidikan dasar merupakan prioritas utama bagi semua negara berkembang. Sebagian besar negara dunia terbesar anggaran pengeluaran pemerintah yang dialokasikan ke sektor pendidikan. Walaupun jumlah penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan sudah banyak meningkat, namun tingkat buta huruf masih sangat tinggi, dibandingkan dengan yang ada di negara maju. (Todaro, 2000)

Masalah yang kedua yaitu kesehatan Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, oleh karena itu kesehatan adalah Hak bagi setiap penduduk yang dilindungi Undang-Undang Dasar. Perbaikan layanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang sejahtera. Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan penduduk, karena tingkat kesehatan memiliki keterkaitan kemiskinan. (Todaro, 2000)

Berdasarkan data bps.go.id. realisasi pengeluaran pemerintah di provinsi yang ada diseluruh Indonesia menurut jenis pengeluaran seperti belanja tidak langsung, 2019 mencapai 214 231 884 921.00, sedangkan 2020 mencapai 237 052 440 246.00 serta 2021 pengeluarannya mencapai 237 052 440 246.00 dan pengeluaran belanja langsung 2019 sebesar 140 591 613 847.00 sedangkan 2020 yaitu mencapai 155 707 689 371.00 serta 2021 yaitu sebesar 155 707 689 371.00. berdasarkan penjelasan dan data diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui review jurnal dengan judul “**Analisis Pendapatan dan Pengeluaran Negara Indonesia Tahun 2019-2021**”.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah dengan menggunakan kajian pustaka dan mencari informasi melalui jurnal dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang di angkat. Kemudian mengunduh laporan penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tercatat di badan pusat statistik melalui laman website bps.go.id.

Hasil dan Pembahasan

Penerimaan Negara

Menurut Sparmoko (Basri, 2005: 43) Penerimaan negara merupakan sebagai penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah dan mencetak uang. Penerimaan dari sektor pajak ini sendiri dapat digunakan untuk sumber keuangan negara dan keuangan daerah yang nantinya berfungsi sebagai dana untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan. Menurut (Basri, 2003: 1) Keuangan Negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang maupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak hak tersebut.

Menurut UU Nomor 17 tahun 2003 Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara sebagaimana dimaksud pada UU Nomor 17 tahun yaitu:

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. Penerimaan Negara.
- d. Pengeluaran Negara.
- e. Penerimaan Daerah.
- f. Pengeluaran Daerah.

- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara dan daerah.
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan kepentingan umum.
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Negara juga mempunyai kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yaitu:

- a. Kewajiban menyelenggarakan tugas negara demi kepentingan masyarakat, contohnya pemeliharaan keamanan dan tata tertib, perbaikan jalan raya.
- b. Kewajiban dan hak-hak tagihan pemborong, setelah barang /bangunan diterima dengan baik oleh instansi.

Pendapatan Negara adalah sebuah pemasukan Negara yang digunakan sebagai sumber perdanaan kegiatan dan kebutuhan Negara dengan rangka pembangunan Negara, dengan pendapatan Negara atau penerimaan pemerintah yakni meliputi pajak, retribusi, keuntungan perusahaan Negara, denda, sumbangan masyarakat, dll. Dalam hal ini pendapatan Negara yaitu berasal dari pajak maupun non pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kemakmuran negara ditandai dengan ekonomi yang stabil dan inflasi yang rendah, hampir tidak ada. Perekonomian berkembang bila didukung oleh sektor keuangan yang kuat. Salah satu sumber pendapatan pemerintah yang menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan mengisi APBN berasal dari sektor pajak. (Kurniawati, 2017; Fatima & Adi, 2019; Herlan & Chasbiandani, 2019; Mahadianto & Rahmawati, 2019; dan Iskandar, 2020) Sebagai penerimaan pemerintah, pajak berperan penting dalam distribusi penerimaan pajak dalam hal pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. (FAHMI, 2019 dan Sihalo, 2020) Pemerintah membiayai pengeluaran publik melalui pajak dan biaya yang dikumpulkan dari pembayar pajak individu dan perusahaan. (Lin & Jia, 2019) Pajak semakin dilihat sebagai sumber pendanaan pemerintah, mengingat bahwa mereka

tidak dapat selamanya bergantung pada sumber daya alam yang pada akhirnya akan habis. Pajak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran publik (Waluyo, 2009). Pajak juga berfungsi sebagai alat pemerataan ekonomi. (Nusiantari & Swasito, 2019)

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara karena bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan saat ini. Penerimaan pajak pemerintah dapat berupa pajak langsung maupun tidak langsung. Pajak langsung meliputi pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan (PBB), bea tanah dan hak milik (BPHTB) dan pajak lainnya. Pajak tidak langsung ada yang berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM). PPN berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara (Hartanti, Pujiwidodo & Sianturi, 2018).

Peningkatan penerimaan pajak harus dapat mendukung pengeluaran pemerintah. Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang penting. Upaya peningkatan penerimaan pajak dapat dilakukan melalui ekspansi atau konsolidasi (Wulandari & Wibowo, 2020). Peningkatan penerimaan pajak dapat dicapai dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan Wajib Pajak (Lainutu, 2013; Amanah, Fauziati, & Putri, 2018; dan Masyitah, 2020). Selain itu, meningkatkan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajak sangat penting (Herryanto & Toly, 2013; Soliha, Wibisono, & Hermawan, 2019; dan Yasa, Kesawa, & Dewi, 2020). Upaya pemerintah untuk memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri merupakan upaya untuk menghindari penggelapan pajak (Pratiwi & Prabowo, 2019). Sehingga penerimaan pajak pemerintah meningkat.

Peningkatan basis pajak berdampak positif pada pendapatan pemerintah, tetapi dapat mengganggu perkembangan bisnis. Overburdening dapat mempengaruhi lingkungan bisnis (Hartono & Setyowati, 2011; Joni, 2015; dan Nugroho et al., 2020). Pajak dapat dikenakan kepada warga negara sebagai imbalan atas pengembalian dari pemerintah, namun tentu saja warga negara tidak dapat langsung menikmati pengembalian tersebut. Kesejahteraan masyarakat dapat tercapai apabila pajak digunakan untuk mendanai kegiatan produktif dan menghasilkan keuntungan (Saragih, 2018).

PPh adalah pajak yang dipungut selama satu masa pajak, misalnya satu tahun di mana penghasilan dibebankan oleh perorangan atau badan hukum (Pejabat, 2016). PPh merupakan sumber penerimaan pajak yang penting (Budi & Ajimat, 2019; dan Sihaloho, 2020). Pajak dapat memperlambat pertumbuhan angkatan kerja dan mencegah penciptaan tenaga kerja baru (Mawejje & Sebudde, 2019). H1: PPh berdampak negatif terhadap penerimaan pemerintah.

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada barang atau barang selama pembuatan dan distribusi, di mana pajak masukan dapat dikompensasikan dengan pajak pertambahan nilai. Ini berarti bahwa sementara penjual harus membayar pajak atas semua penjualan mereka (pajak keluaran), mereka juga dapat mengklaim pengembalian dana (pajak masukan) untuk pajak yang dikenakan atas pembelian mereka. Ketika konsumsi barang dan jasa meningkat maka produksi barang dan jasa meningkat dimana penerimaan pajak tinggi (Handoko, Aimon, & Sofyan, 2014). Semakin tinggi PPN maka semakin tinggi penerimaan pajak (Jusmani & Kurniawan, 2016) dan (Prayudi & Sejati, 2019). H2: PPN dan PPnBM berdampak positif terhadap penerimaan negara.

PBB adalah pajak bumi dan/atau bangunan berdasarkan UU Pajak Bumi dan Bangunan No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994. BPHTB adalah pajak yang dipungut atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (Pejabat, 2016). Luasnya wilayah Indonesia tidak menjamin pendapatan pajak properti dan konstruksi yang tinggi. Persepsi tentang biaya administrasi yang tinggi untuk memperbarui informasi, manfaat (fiskal) yang rendah, dan kurangnya kesadaran umum membuat pajak properti atau konstruksi tidak efektif (Kalkuhl et al., 2018). Pertumbuhan PBB telah menjadi pilar penting penerimaan pajak. Semakin efisien pemungutan PBB maka penerimaan pajak semakin tinggi. (Chandra, Sabijono dan Runtu, 2020) H3: PBB dan BPHTB berpengaruh negatif terhadap penerimaan pemerintah.

Bea masuk dan bea lelang merupakan pendapatan pemerintah yang diklasifikasikan sebagai pajak lain-lain. Penggunaan bea meterai dan bea lelang yang tidak dapat diprediksi menimbulkan ketidakpastian bagi penerimaan pajak lainnya. H4: Pajak lainnya memiliki dampak negatif terhadap pendapatan pemerintah.

Bea masuk adalah pajak atas barang impor. Sifat dan kondisi barang impor mempengaruhi pungutan bea masuk. Pajak impor atas barang impor dihitung dari harga barang (cost), asuransi (asuransi) dan biaya pengangkutan (freight), diubah menjadi satuan rupiah sesuai dengan nilai tukar pada hari penghitungan pajak impor. Arus impor yang besar mempengaruhi pertumbuhan penerimaan pajak, sedangkan arus impor yang kecil mempengaruhi penerimaan pajak yang rendah (Hilal & Lisna, 2019; Purwana, 2019 dan Masyitah, 2020). H5: Pajak impor berpengaruh positif terhadap pendapatan pemerintah

Cukai adalah pajak yang dipungut atas barang-barang yang dimaksudkan undang-undang untuk menambah kekayaan rakyat (Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2007). Barang kena cukai hanya ada tiga yaitu etil alkohol (EA) atau etanol, etil alkohol minuman (MMEA) dan hasil tembakau, sehingga potensi penerimaan pajaknya rendah. Adanya cukai meningkatkan penerimaan pemerintah tetapi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Suprihanti, Sinaga & Kustiari, 2019). H6: Pajak konsumsi memiliki efek positif pada pendapatan pemerintah

Pajak ekspor dipungut sebagai PPN atas ekspor barang kena pajak, seperti Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Kebijakan pajak ekspor pemerintah mempengaruhi penerimaan dari produk dalam negeri yang selanjutnya mempengaruhi penerimaan pajak (Agusalim, 2014). H7: Pajak ekspor berdampak negatif terhadap pendapatan pemerintah

Pendapatan non pajak merupakan suatu pendapatan negara selain dari pajak. Pendapatan non pajak berasal dari:

1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan pemerintah.
2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam.
3. Penerimaan pada penghasilan pengelolaan kekayaan Negara yang di pisah.
4. Penerimaan dari suatu pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.
5. Penerimaan yang didasarkan oleh keputusan pengadilan dari pengenaan denda administrasi.
6. Penerimaan berupa hibah merupakan suatu hak pemerintah.
7. Penerimaan yang lainnya diatur pada undang-undang itu sendiri.

Pendapatan nasional merupakan peran penting dalam perekonomian Negara. Pendapatan nasional Negara biasa mengetahui tentang efisien sumber daya pada perekonomian juga berguna untuk mengetahui besar produksi barang dan jasa tersebut. Pendapatan nasional juga merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu Negara dalam periode tertentu.

Pendapatan nasional merupakan PDB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada dasarnya PDB merupakan jumlah pada nilai tambahan yang dihasilkan oleh semua unit usaha pada suatu Negara tertentu. PDB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahunnya.

Tabel 1 Data Pendapatan Negara Tahun 2019-2021

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2019	2020	2021
I. Penerimaan	1955136.20	1628950.53	1733042.80
<i>Penerimaan Perpajakan</i>	1546141.90	1285136.32	1375832.70
Pajak Dalam Negeri	1505088.20	1248415.11	1324660.00
Pajak Penghasilan	772265.70	594033.33	615210.00
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	531577.30	450328.06	501780.00
Pajak Bumi dan Bangunan	21145.90	20953.61	14830.00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
Cukai	172421.90	176309.31	182200.00
Pajak Lainnya	7677.30	6790.79	10640.00
Pajak Perdagangan Internasional	41053.70	36721.21	51172.70
Bea Masuk	37527.00	32443.50	33172.70
Pajak Ekspor	3526.70	4277.71	18000.00
<i>Penerimaan Bukan Pajak</i>	408994.30	343814.21	357210.10
Penerimaan Sumber Daya Alam	154895.30	97225.07	130936.80
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	80726.10	66080.54	30011.20
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	124503.60	111200.27	117949.70
Pendapatan Badan Layanan Umum	48869.30	69308.33	78312.40
II. Hibah	5497.30	18832.82	2700.00
Jumlah	1960633.60	1647783.34	1735742.80

Sumber : Data Olahan Peneliti (2022) atau BPS (2022)

Grafik 1 Jumlah hasil Pendapatan Negara Tahun 2019-2021



Sumber : Data Olahan Peneliti (2022)

Pengeluaran Negara

Pengeluaran Negara merupakan pengeluaran yang digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan di suatu Negara untuk rangka menjalankan fungsinya yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pasca pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan adanya kekuasaan yang menyeluruh, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional, yang diwujudkan dalam pengaturan, pendistribusian, dan penggunaan sumber daya yang adil serta pengelolaan keuangan yang nyata, transparan, efisien, dan fungsional. Keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pembiayaan administrasi daerah sehubungan dengan pemerataan keuangan antara pemerintah federal dan negara bagian dilakukan atas dasar desentralisasi, desentralisasi dan manajemen bersama.

Pembangunan yang dilakukan di daerah harus dibangun di atas ketiga landasan tersebut, diperlukan biaya/anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah di semua daerah, dan pemerintah kota juga harus berupaya mencari sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi adalah sumber daya sendiri daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan lain yang sah, anggaran desentralisasi dan anggaran administrasi bersama. Dipahami bahwa akibat krisis multidimensi tahun 1997, sumber-sumber pendapatan primer lokal berkurang akibat krisis yang dimulai dengan krisis mata uang dan konflik sosial 1999-2004, yang mengakibatkan terbatasnya sumber daya ekonomi daerah. Munculnya otonomi daerah ditanggapi dengan harapan dan keprihatinan yang berbeda-beda oleh warga semua daerah,

membuat sebagian warga daerah mendambakan kesejahteraan dan kemakmuran otonomi daerah. Namun, beberapa daerah khawatir karena menyadari kekurangan potensi dan sumber daya.

Pengeluaran publik (public expenditures) merupakan bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2004), yaitu langkah-langkah pemerintah untuk mengatur arus perekonomian melalui penetapan tahunan tingkat pendapatan dan pengeluaran masyarakat yang tercermin dalam dokumen APBN nasional dan APBD daerah/wilayah. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah untuk menstabilkan harga, tingkat produksi dan kesempatan kerja serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran publik adalah seperangkat produk yang dihasilkan yang mencakup keputusan atau keputusan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah adalah jumlah keputusan anggaran yang dibuat oleh setiap tingkat pemerintahan (Pusat-Prop-Kabin/Kota). Setiap tingkat pemerintahan ini mungkin memiliki proses pengambilan keputusan akhir yang berbeda, dan hanya dalam beberapa hal pemerintah yang lebih tinggi dapat mempengaruhi pemerintah yang lebih rendah. Menurut Suparmoko (2004), pengeluaran pemerintah dapat dievaluasi dari berbagai perspektif, sehingga dapat dirinci sebagai berikut:

Undang-Undang Republik Indonesia, 2004. Undang-Undang Pemda No. 32 Tahun 2004. Pembangunan sarana dan prasarana kota berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Prasyarat dasar pembangunan ekonomi adalah perolehan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Perluasan infrastruktur dan perbaikan kota bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada saat menjalankan fungsinya tersebut tayang menggunakan SDE yang dimiliki suatu pendirian pada prinsip inti pengeluaran Negara. Prinsip inti tersebut terdiri dari:

- Prinsip Azaz Moralita, yaitu kumpulan nilai-nilai yang dibebankan oleh masyarakat atau bangsa
- Prinsip Nasionalita, yaitu berupa aza yang telah menjadi tugas dasar dan pelaksanaan tugas kewajiban pemerintah serta merupakan identitas bangsa

- Prinsip Kerakyatan, rakyat adalah suatu pihak yang wajib dilayanin tapi rakyat juga merupakan sebagai pemegang kedaulatan, sehingga keuanga Negara tidak boleh sama sekali merugikan masyarakat.
- Azaz Rasionalitas, azaz ini mewajibkan setiap segala perilaku atau tindakan pemerintah harusnya didasarkan oleh penggunaan akal sehat
- Azaz Fungsionalita, pemberian tugas dan pembagian kekuasaan

Macam-macam pengeluaran Negara

Pengeluaran Negara memiliki 2 macam pengeluaran Negara, yaitu menurut organisasi dan sifat.

Menurut organisasi , terdiri dari 3 golongan yaitu:

a. Pemerintah Pusat.

Pada pemerintahan pusat, memiliki anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), yaitu suatu dana yang digunakan untuk meningkatkan kedamaian masyarakat. Didalam APBN, pengeluaran pemerintah pusat dibedakan menjadi 2 pengeluaran belanja dan pembiayaan.

b. Pemerintah Provinsi

Pemerintah provinsi terdapat APBN yang merupakan hasil dari suatu dana alokasi APBN dari pemerintah pusat dan juga hasil pungutan pajak dari semua masyarakat. Dana APBN berguna untuk pengeluaran belanja seperti belanja operasi dan modal.

c. Pemerintah Kabupaten atau Kota

APBN pada kabupaten atau kota digunakan antara lain sebagai pengeluaran yang digunakan untuk belanja, bagi hasil pendapatan untuk desa/kelurahan, terdiri dari bagi hasil pajak dari desa/kelurahan, dan sebagainya.

Menurut sifatnya, terdiri dari 5 yaitu:

a. Pengeluaran Investasi

Pengeluaran investasi yaitu suatu pengeluaran yang tujuan untuk menambah kekuatan dan pertahanan ekonomi untuk masa yang akan datang.

b. Pengeluaran Penciptaan Lapangan Pekerjaan

Digunakan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat.

c. Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat

Pengeluaran kesejahteraan rakyat adalah pengeluaran yang memiliki suatu pengaruh langsung pada kesejahteraan rakyat dan pengeluaran yang membuat rakyat menjadi tentram.

d. Pengeluaran Penghematan Masa Depan

Suatu pendapatan yang tidak mendapatkan kegunaan secara langsung bagi Negara, tapi bila dikeluarkan pada saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintahan yang cukup besar dimasa yang akan mendatang.

e. Pengeluaran yang tidak Efektif

Suatu pengeluaran yang tidak memiliki manfaat secara langsung kepada masyarakat, tapi digunakan oleh pemerintahan.

Pengaruh pengeluaran negara terhadap perekonomian

Ada beberapa pengaruh pengeluaran Negara terhadap sektor perekonomian, yaitu:

a. Sektor Produksi

Dilihat secara massa pengeluaran Negara adalah faktor produksi yang memenuhi faktor-faktor produksi yang lainnya. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan sangat berpengaruh secara tidak langsung pada perekonomian, dikarenakan pendidikan akan menghasilkan SDM yang sangat berkualitas.

b. Sektor Distribusi

Pengeluaran Negara secara tak langsung memiliki pengaruh pada sektor distribusi barang dan jasa. Pengeluaran pemerintahan untuk biaya pendidikan SD-SLTA menjadikan rakyat yang kurang mampu bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Jika pemerintah tidak mengeluarkan dana untuk keperluan tersebut, maka distribusi pendapatan, barang, dan jasa akan berbeda.

c. Sektor Konsumsi Masyarakat

Dengan adanya pengeluaran pemerintahan untuk subsidi, tidak hanya menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati suatu barang atau pun jasa, tapi juga membuat rakyat yang sudah mampu akan mengkonsumsi produk atau jasa lebih banyak lagi.

d. Sektor Keseimbangan Perekonomian

Agar bisa mencapai suatu target untuk peningkatan PDB, pemerintahan bias atur alokasi dan juga tingkat pengeluaran Negara. Tapi apabila target penerimaan tak memadai untuk membiayai pengeluaran itu, pemerintahan bias membiayai dengan menggunakan pola deficit anggaran.

Tabel 2 Data Pengeluaran Negara Tahun 2019-2021

Pengeluaran Negara	Realisasi Pengeluaran Negara (Keuangan) (Milyar Rupiah)		
	2019	2020	2021
PENGELUARAN NEGARA	2309287.30	2595481.10	2697237.00
<i>I. Pengeluaran Pemerintah Pusat</i>	1496313.90	1832950.92	1926964.90
1. Belanja Kementerian dan Lembaga	873426.40	1059617.34	1059433.20
2. Belanja Non-Kementerian dan Lembaga	622887.50	773333.59	867531.70
<i>II. Pengeluaran untuk Daerah</i>	812973.40	762530.18	770272.10
1. Transfer ke Daerah	743159.30	691429.66	698416.10
a. Dana Perimbangan	711284.90	652097.64	664404.10
b. Dana Insentif Daerah	9694.40	18455.29	13209.10
c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY	22179.90	20876.73	20802.90
2. Dana Desa	69814.10	71100.52	71856.00
<i>III. Suspen</i>	-	0.00	0.00

Sumber : Data Olahan Peneliti (2022)

Grafik 1 Jumlah hasil Pengeluaran Negara Tahun 2019-2021



Sumber : Data Olahan Peneliti (2022)

Kesimpulan

Pada bahasan ini dapat penulis lihat bahwa pajak merupakan sumber penerimaan/pendapatan terbesar bagi Negara Indonesia. Berdasarkan sektornya Industri pengolahan atau manufaktur adalah penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Kontribusi sector ini terbilang cukup besar yaitu 29,4%. Sedangkan sektor yang menduduki peringkat kedua di perpajakan Indonesia adalah Perdagangan dengan Kontribusi sebesar 24,8%. Sumber penerimaan Negara Indonesia berasal dari dalam dan luar negeri yaitu, sumber pendapatan pajak,

sumber pendapatan non pajak, dan sumber pendapatan hibah yang berasal dari luar negeri. Sedangkan pengeluaran rutin pemerintah Indonesia yaitu, belanja pegawai seperti gaji, tunjangan pegawai, uang makan, dan biaya lainnya untuk pegawai Negeri, belanja barang yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, belanja rutin daerah untuk pegawai dan non pegawai, untuk membayar utang dan bunga dari dalam dan luar negeri, pengeluaran bahan bakar minyak dan listrik (subsidi) kemudian berbagai pengeluaran yang bersifat non departemen. Dari pengeluaran Negara ini ada beberapa sektor yang terpengaruh yaitu, sektor produksi, sektor distribusi, sektor konsumsi, dan sektor keseimbangan perekonomian.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik 2022. Pendapatan Negara Di Akses 18 Desember 2022 <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Badan Pusat Statistik 2022. Pengeluaran Negara Di Akses 18 Desember 2022 <https://www.bps.go.id/indicator/13/1085/1/realisasi-pengeluaran-negara-keuangan-.html>
- Kurniasih, D. A. (2016). Pembaharuan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(2), 213-228.
- Kurniawan, S. A. (2020). Pendapatan Nasioanal Terhadap Hubungan Antara Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Jawa Timur. *Pendapatan Nasional Terhadap Hubungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Jawa Timur*, 1-15.
- Nahumuri, L. L. (2019). Esensi Dan Urgensi Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 4(1), 1-12.
- Nugroho, G. A. (2016). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 1(1), 39-50.
- Prasetya, F. (2012). Modul Ekonomi Publik Bagian V: Teori Pengeluaran Pemerintah. Universitas Brawijaya Malang, 1-36.
- Sarjono, F. S. (2017). Analisis Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Penghasilan dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Program Amnesti Pajak serta Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Sitaniapessy, H. A. (2013). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDRB dan PAD. *Jurnal Economia*, 9(1), 38-51.